

ANALISIS BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA BARAT

Salo Holombau¹⁾

Natalia Paranoan²⁾

Manuel August Todingbua³⁾

^{1,2,3)} Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus

¹⁾ saloholombau@gmail.com



e-ISSN 2686-0058

p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

22 Agustus 2025

Tanggal revisi

18 Oktober 2025

Tanggal diterima

30 Januari 2026

Kata Kunci:

Cash Social
Assistance, Poor
Community, Intan
Jaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bantuan sosial tunai tpada masyarakat miskin serta menganalisis faktor penghambat penyaluran BST di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Informan penelitian ini sebanyak 7 orang penyalur/staff Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator evaluasi kebijakan. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pegawai dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah 1)Penyaluran BST hendaknya memenuhi standar efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsif dan ketepatan, 2) Faktor penghambat penyaluran BST di Kabupaten Intan Jaya adalah sulitnya medan dan lokasi yang terpencil serta pendidikan masyarakat yang rendah sehingga menyulitkan kerjasama dalam penyaluran bantuan.

ABSTRACT

This research aims to analyze cash social assistance for the poor and to analyze the factors hindering the distribution of BST in Intan Jaya Regency, Central Papua Province. The informants in this study are 7 distributors/staff from the Social Service and members of the community receiving assistance. The data analysis method that will be used in this research employs policy evaluation indicators. The data used are primary data obtained through direct observation and interviews with employees and the community in Intan Jaya Regency, Central Papua Province. The results of this study are 1) The distribution of BST should meet the standards of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, 2) The factors hindering the distribution of BST in Intan Jaya Regency are the difficult terrain and remote locations, as well as the low education level of the community, which complicate cooperation in the distribution of aid.



PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, penduduk miskin merupakan masalah yang tidak pernah selesai, meskipun Indonesia sudah melaksanakan pembangunan nasional, regional serta mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana

pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat (Gultom, 2020). Hal ini menjadi penyebab masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Hardana, 2022).

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi Pemerintah baik pusat maupun daerah pasti memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertera dalam UUD 1945. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pembangunan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang penting, strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih lengkap harus mengambil faktor yang relevan, dalam konteks desentralisasi, analisis sub nasional dapat menjadi pendekatan instruktif untuk memeriksa pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan (Hafizah, 2019).

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), (BST) dan Raskin. sedangkan kebijakan tidak langsung, antara lain program jamkesmas, program IDT, dan dana BOS. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi (Ismail, 2021; Muharir, 2021).

Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Intan Jaya, data per 30 November 2024 tercatat 41,42 persen. Jumlah ini naik 1,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan 40,01 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2024 lalu di kabupaten/kota ini berjumlah 137,34 ribu jiwa dan Kabupaten Intan Jaya menempati urutan tertinggi masyarakat miskin di Provinsi Papua Tengah.

Berikut ini daftar persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Tengah pada 2024 ditunjukkan pada Table 1.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin di Papua Tengah
Tahun 2024

No	Kabupaten	Persentasi Kemiskinan
1	Kabupaten Intan Jaya	41%
2	Kabupaten Deiyai	39%
3	Kabupaten Puncak	37%
4	Kabupaten Paniai	37%
5	Kabupaten Puncak Jaya	35%
6	Kabupaten Dogiyai	30%
7	Kabupaten Nabire	24%
8	Kabupaten Mimika	14%

Sumber: data diolah

Program pemerintah untuk mengurangi dampak kemiskinan dilakukan melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai), kemudian melalui BST (Bantuan Sosial Tunai). Perbedaan BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah sama-sama bantuan yang berupa uang tunai hanya saja sumber dananya yang berbeda, BST bersumber dari dana Kementerian Sosial, sedangkan BLT bersumber dari Dana Desa. BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos (Puspaningsih, 2016; Srawswati, 2018).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis Bantuan Sosial Tunai pada masyarakat miskin di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, 2) Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Manfaat teoritis, penelitian ini untuk pengembangan wawasan ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai program Bantuan Sosial Tunai dan pengentasan kemiskinan. 2) Sebagai masukan dan informasi kepada Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dalam kaitannya dengan Pengentasan kemiskinan dengan Bantuan Sosial Tunai.

KAJIAN LITERATUR

Bantuan Sosial Pemerintah

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan. Menurut

Kementrian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin yang terlantar ditingkat bawah. Program ini merupakan implementasi UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Rarun, 2018).

Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu Bantuan Tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos RI untuk membantu masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik.

Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Prosedur pencairan BST adalah sebagai berikut:

1. BST akan di transfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.
2. Bagi yang memilih sistem transfer rekening, dapat melalui rekening: BRI, BNI, Mandiri dan BTN.
3. Bagi yang tak punya rekening bank, dapat mengambil uang BST melalui Kantor Pos. Proses pencairan langsung penerima BST secara non tunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga.
4. Setelah memenuhi kriteria tersebut dan terdaftar di DTKS, langkah selanjutnya adalah pencairan. Masyarakat bisa melakukan pencairan di kantor PT Pos Indonesia sebagai penyalur dengan membawa beberapa dokumen sebagai syarat.

Masyarakat Miskin

Kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengartikan kemiskinan menjadi sebuah situasi atau kondisi dimana mengalami serba kekurangan yang berlangsung dalam kehidupan bukan karena keinginan si miskin, akan tetapi sesuatu yang tidak dapat dihindari dikarenakan ketidak mampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Jika dilihat dari segi ekonomi, kemiskinan dapat terjadi dikarenakan oleh 3 hal utama, antara lain: 1) adanya ketidak samaan sumber daya antar sesama pihak yang membawa akibat timpangnya distribusi pendapatan, 2) Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, dimana apabila kualitas sumber daya manusia itu rendah maka sisi produktivitasnya pun akan rendah yang berarti rendah juga pendapatan yang diterima. 3) Perbedaan akses dan modal (Hardana, 2022;

Harahap, 2022).

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kemampuan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, dan struktural.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *nonpositivisme*, digunakan untuk meneliti situasi sosial tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri atau human instrumen, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian tersebut ditetapkan agar dilakukan karena dapat digunakan untuk menjawab pemecahan permasalahan terhadap fenomena di lapangan, dan merupakan cara serta langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus melalui observasi, wawancara dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

Informan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua Tengah. Adapun distrik di Kabupaten Intan Jaya berjumlah 8 distrik yaitu: Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Tomasiga, Distrik Omeo, Distrik Sugapa, Distrik Biandoga, Distrik Wandae.

Informan penelitian sebanyak 7 orang yang meliputi penyalur/staf dari Dinas Sosial dan masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

Observasi

Observasi non partisipan dilakukan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dan observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, yaitu yang terkait dengan program BST yang diberikan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya kepada masyarakat. Pengamatan dilakukan dengan cara, penulis datang langsung ke distrik Kabupaten Intan Jaya untuk melihat bagaimana kegiatan penyaluran BST kepada masyarakat miskin.

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para penyalur BST dan masyarakat penerima bantuan. Wawancara mendalam dilakukan dengan membuat pertanyaan terstruktur dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Wawancara berupa pertanyaan yang

sama, dan pengumpul data mencatat dan mengajukan kepada para penyalur BST dan masyarakat penerima bantuan terkait dana BST.

Dokumentasi.

Metode dokumentasi bisa dilakukan dengan pedoman dokumentasi yang terdiri dari kategori atau garis-garis besar yang akan dicari datanya. Dan checklist adalah daftar variabel yang hendak dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti hanya menandai semua permunculan fenomena yang dimaksud. Dikatakan juga, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data primer dan sekunder yang telah ada, baik yang diperoleh pada instansi/lembaga tempat penelitian, buku, laporan internet, dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainnya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan penyaluran dana BST di Kabupaten Intan Jaya.

Teknik Analisis Data

Sesudah data-data terkumpul maka dilakukan suatu analisis data. Analisis data adalah merupakan suatu proses mengolah data dari penyebaran angket/wawancara yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan indikator evaluasi Kebijakan William Dunn untuk menganalisis Bantuan Sosial Tunai yaitu: 1) efektifitas (*Effectiveness*) berhubungan dengan apakah suatu substitusi mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berkenaan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari bagian produk atau layanan atau nilai moneter. 2) Kecukupan (*Adequacy*) Berhubungan dengan seberapa maksimal suatu Tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menimbulkan adanya masalah. Tolak ukur kecukupan menekankan pada efektifnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 3) Pemerataan/ Kesamaan (*Equity*) berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan mengarah pada distribusi akibat dan usaha di sela-sela kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang berdampak (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil disalurkan. Kebijakan yang dibuat untuk mensalurkan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan public sewaktu-waktu direkomendasikan atas dasar tolak ukur kesamaan. Tolak ukur kesamaan sangat berkaitan dengan konsepsi yang saling berlomba, yaitu keadilan atau kebiasaan dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang mencoba untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat. 4) Responsivitas (*Responsiveness*) berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tolak ukur responsivitas yaitu penting karena analisis yang dapat memuaskan semua tolak ukur lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal apabila belum menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. 5) Ketepatan (*Appropriateness*). Ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berhubungan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya anggapan yang melandasi tujuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Daerah ini dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H. Mardiyanto pada tanggal 26 November 2008. Kabupaten ini berpenduduk 137.171 jiwa pada akhir tahun 2023.

Kabupaten Intan Jaya terletak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Wilayahnya didominasi oleh dataran tinggi, namun wilayah dataran rendah dapat ditemukan di Distrik Tomosiga serta sebagian kecil wilayah Distrik Mbiandoga dan Agisiga. Hampir semua penduduk di Kabupaten Intan Jaya merupakan masyarakat miskin yang hidup dari berkebun, menggantungkan hidupnya pada alam. Pendapatan rata-rata penduduk adalah sebesar Rp 400.000 per bulan. Oleh sebab itu pemerintah sejak tahun 2020 memberikan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai yang ditujukan kepada keluarga miskin atau kurang mampu di desa yang sumber dananya berasal dari Dinas Sosial dengan tujuan pengalokasian bantuan adalah mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat miskin. Dalam pengalokasian program BST pemerintah menetapkan aturan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan diri sebagai calon penerima program BST harus dalam status tidak menerima jenis bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan merasakan pelayanan yang diberikan dan diterima. Oleh sebab itu, informan diambil dari penyalur BST dan masyarakat penerima bantuan Kabupaten Intan Jaya sebagai pemberi layanan dan masyarakat pengguna yang merasakan pelayanan langsung. Daftar informan ditunjukkan pada table 2 berikut.

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan/Distrik
1	Yosep Tipagau	Penyalur / Wandae
2	Amos Kobogau	Penyalur / Biandoga
3	Yusuf Jarinaf	Penyalur/Agisiga,
4	Dan Joani	Penyalur /Distrik Sugapa
5	Samar	Berkebun/Masyarakat
6	Agustinus	Berkebun/Masyarakat
7	Maria	Berkebun/Masyarakat

Sumber: data diolah, 2025

Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran Program kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah telah dilakukan sejak tahun 2020. Jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya sebesar. Untuk menilai apakah dana BST sudah disalurkan dengan baik menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan William N. Dunn. Data diperoleh dari hasil wawancara evaluasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam hal ini Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Intan Jaya belum cukup efektif. Program bantuan tersebut sudah dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah penerima 1000 KK yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun banyak Masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan sebagaimana yang dikemukakan oleh informan Bapak Yosep Tipagau:

“banyak Masyarakat yang belum terdata dengan baik, karena tidak memiliki KTP dll sehingga dana yang ada dibagikan pula kepada masyarakat tersebut. Resikonya adalah jumlah yang dibagi dari pendaftar resmi menjadi berkurang. “

Informan dari Masyarakat Bapak Samar:

“BST yang diberikan pemerintah masih kurang, belum cukup memenuhi kebutuhan Masyarakat karena tingginya harga bahan-bahan di sini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam hal ini efektivitas BST belum cukup untuk meringankan beban perekonomian masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut menyatakan bahwa bantuan tersebut belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat namun bantuan ini hanya mampu meringankan sedikit beban kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa program BST ini masih dikatakan belum cukup efektif karena belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, setidaknya bantuan tersebut masih bisa menutupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Dari hasil wawancara juga dikatakan bahwa penerima bantuan merasa kurang puas, karena sebagian masyarakatnya masih ada yang berhak mendapatkan bantuan dan bantuan yang diberikan jumlahnya kecil.

Menurut informan bapak Amos Kobogao:

”Bantuan yang seharusnya masyarakat terima sebanyak 6 juta rupiah per kk menjadi berkurang karena banyak yang belum terdaftar. Biasa kami bagi menjadi 1 juta per KK per triwulan.”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kebijakan Program BST ini masih belum cukup efektif, hal tersebut dikarenakan ditemukan masih adanya masyarakat yang berhak mendapatkan program ini akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Ditemukan juga adanya masyarakat yang menerima bantuan lain selain BST, yang seharusnya setiap keluarga hanya bisa mendapatkan juga didukung oleh beberapa informan di atas bahwa dalam pemilihan BST ini perlu pembaharuan data agar pada pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai selanjutnya sudah tetap sasaran bagi masyarakat miskin di Kabupaten

Intan Jaya tersebut.

2. Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan bahwa kecukupan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini belum dapat meringankan beban kebutuhan masyarakat miskin walaupun masyarakat merasa dengan adanya bantuan ini, setidaknya sedikit dapat membantu kebutuhan. Pencapaian yang diharapkan dapat sedikit membantu kebutuhan masyarakat miskin, dengan alternatif tersebut masyarakat merasa cukup untuk menutupi kebutuhan.

Informan Ibu Maria:

“harga barang-barang sangat tinggi, misal beras dihargai Rp 50.000 per kg, bensin Rp 250.000 per 5 liter. Semua barang-barang sangat mahal, karena kurang pasokan dan tidak ada kios. Beda kalau di kota, harga masih lebih rendah.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kabupaten Intan Jaya dalam mengatasi permasalahan umum yang sedang dihadapi masyarakat memang sudah tepat, karena masyarakat ini sendiri merasa senang dan bersyukur, hal ini penulis telah mengamati melalui kondisi lingkungan dan sosial yang mayoritasnya adalah masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam keluarga penerima bantuan atau manfaat. Dalam hal ini, penulis juga melihat bahwa bantuan dalam bentuk tunai yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menerima sudah cukup baik dan sudah tepat penggunaannya.

3. Pemerataan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemerataan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya belum adil dan belum didistribusikan secara merata. Dalam hal ini, seharusnya setiap masyarakat penerima mendapatkan jumlah dan biaya merata yaitu sebesar Rp 6 juta per tiga bulan per KK namun hal tersebut tidak terlaksana dengan baik sehingga masyarakat mendapat Rp 1 juta per 3 bulan per KK. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan bapak Yusuf Jarinaf:

“yah, penyaluran dana belum merata ke semua masyarakat karena banyak masyarakat belum terdaftar, akibat lokasi yang terpencil, dan lain-lain. Sehingga dana itu dibagi lagi agar semua bisa dapat.”

Adapun hasil dari observasi peneliti, senada dengan hasil wawancara, dimana program BST belum merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Jadi berdasarkan hasil peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari peneliti di atas, maka sudah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan Bantuan Sosial Tunai belum merata dan juga adanya perbedaan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat penerima tersebut.

4. Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara di Kabupaten Intan Jaya bahwa tingkat memuaskan prefensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu sudah mendapatkan respon yang cukup baik bagi para penerima bantuan. Dalam hal ini, walaupun dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa bantuan ini belum cukup meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dapat dilihat pula adanya keluhan dari masyarakat tentang

program BST ini.

Informan Dan Joani:

“Respon masyarakat cukup baik, namun kadang mereka mengeluh karena kecilnya dana bantuan yang mereka terima.”

Bapak Agustinus mengatakan bahwa:

“biar kecil dana yang kita terima tetapi tetap bersyukur. Semoga ke depannya dana yang didapat bisa lebih besar lagi jumlahnya supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kami.”

Adapun hasil observasi dari peneliti, program bantuan ini memang sudah cukup baik karena masyarakat penerima merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Walaupun dalam hal ini, tidak sepenuhnya membantu seluruh kebutuhan masyarakat, akan tetapi dapat meringankan beban masyarakat penerima di Kabupaten Intan Jaya tersebut.

Jadi dapat disimpulkan mengenai responsivitas dari Program BST ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa program BST sudah mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat dan program ini telah mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat penerima karena membantu mereka dalam meringankan kebutuhan pokoknya. Begitu pula, dengan adanya respon yang baik dari masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut cukup berhasil dalam mencapai tujuannya.

5. Ketepatan

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber bahwa tingkat ketepatan program BST di Kelurahan Kaluku Bodoa ini sudah dapat memenuhi syarat karena sudah sesuai dengan ketentuan dari persyaratan tersebut. Apalagi terkhusus di wilayah Kabupaten Intan Jaya, yang dimana hampir semua masyarakatnya adalah miskin.

Dari hasil observasi tentang ketepatan program BST ini bagi penerima sudah berguna dan bernilai dengan baik. Sasaran BST tepat, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Masyarakat merasa dengan adanya program bantuan ini sudah cukup meringankan beban perekonomian. Dengan uang tunai ini masyarakat sangat terbantu karena dapat memanfaatkan untuk membeli bahan pokok yang diperlukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Jadi dapat dilihat dari hasil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa penyaluran Program BST di Kabupaten Intan Jaya ini adalah sudah berguna dan bernilai bagi masyarakat tersebut, karena dapat dilihat dari masyarakatnya yang sebagian besar masih miskin.

Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Intan Jaya

Hasil wawancara dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa dalam pengalokasian BST di Kabupaten Intan Jaya sudah dilakukan dengan baik, namun selama penelitian penulis juga menemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut.

1. Lokasi distrik di Kabupaten Intan Jaya sangat sulit sehingga terhambat dalam penyaluran BST. Daerah tersebut hanya dapat dicapai dengan pesawat kecil karena

medan yang berat jika melalui jalan darat.

2. Pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga sulit memahami dan sulit diajak bekerjasama.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat/keluarga yang ditandai meningkatnya kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Dalam hal ini banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti bantuan Sosial tunai (BST).
2. Penyaluran BST hendaknya memenuhi standar efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsif dan ketepatan.
3. Faktor penghambat penyaluran BST di Kabupaten Intan jaya adalah sulitnya medan dan lokasi yang terpencil serta pendidikan masyarakat yang rendah.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Univertas Sam Ratulangi*, Vol. 21 No. 1.
- Hafizah, D., Hakim, D. B., Harianto, & Nurmalina, R. (2019). *Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera Dan Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Titik Equilibrium Rumah Tangga Miskin Di Indonesia*. Vol. 3 No. 4.
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2022). *Analisis Laba Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat*. Vol. 2 No. 2.
- Hardana, A., Nurhalimah, & Efendi, S. (2022). *Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan*. Vol. 1 No. 4.
- Ismail, R. (2021). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap NPenanggulangan Kemiskinan Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan. *IAIN Palopo*.
- Muharrir, & Hariani, R. (2021). Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dan BLT Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang. *STEBIS Indo Global Mandiri*, Vol.2 No.1.
- Puspaningsih, C. (2016). Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa. *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Rarun, Celeste. Ch. E., Kawung, G. M. V., & Niode, A. O. (2018). *Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*. Vol. 18 No. 01.
- Saraswati, A. (2018). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektifitas Ekonomi Islam. *UIN Raden Intan Lampung*.

Sugiyono (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D *ALFABETA* Bandung.